

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia dewasa ini mengemban tugas menghasilkan sumber daya insani bermutu, seperti yang tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Definisi pendidikan nasional tersebut menggambarkan sosok individu yang berkembang dalam segenap aspek, bukan saja aspek akademis-intelektual, tetapi juga aspek pribadi, sosial, dan sistem nilai. Oleh karenanya, pendidikan sebagai pendukung utama bagi terwujudnya insan bermutu semacam ini adalah pendidikan yang mengantarkan peserta didik pada pencapaian standar akademis yang diharapkan, dan kondisi perkembangan diri yang sehat, berjalan secara utuh dan optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang bukan hanya mengedepankan aspek akademis-intelektual namun juga aspek pribadi,

sosial dan sistem nilai tersebut, upaya pendidikan di sekolah/madrasah tentu tidak cukup hanya mengandalkan pada pelayanan yang bersifat instruksional yakni melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, namun juga harus disertai dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang bersifat interpersonal, yang didesain khusus untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu bagi optimalisasi perkembangan siswa dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2003.

Perspektif optimalisasi dan keutuhan dalam memperkembangkan diri individu sebagai insan yang dididik melalui intervensi pendidikan formal, menjadi dasar esensi dan relevansi keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah. Bimbingan dan konseling dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia ditempatkan sebagai bantuan kepada peserta didik untuk dapat menemukan pribadi, dan mengembangkan potensi diri agar peserta didik dapat merencanakan masa depannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Prayitno dan Emran Amti (dalam Hikmawati 2010: 65) mengenai tujuan bimbingan dan konseling sebagai berikut.

“Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.”

Menyadari akan pentingnya bimbingan dan konseling sebagai salah satu aspek yang dapat membantu memberikan berbagai kontribusi positif dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pun mengatur keberadaannya secara formal. Hal ini dibuktikan dengan terdapat sejumlah peraturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, mulai dari Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, SK Mendikbud No. 025/O/1995, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahkan dalam Dokumen Kurikulum 2004 disebutkan bahwa “sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang menyangkut tentang pribadi, sosial, belajar, karier”. Selain itu ada pula ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) sebagai wadah atau organisasi bagi profesi bimbingan dan konseling. Adanya ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling) juga semakin membuktikan keseriusan para praktisi bimbingan dan konseling untuk lebih berkomitmen menunjukkan eksistensi bahwa profesi bimbingan dan konseling juga mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan.

Di dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi juga disebutkan bahwa salah satu komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah komponen pengembangan diri, dimana komponen pengembangan diri inilah yang menjadi area tugas bimbingan konseling. Pengembangan diri yang berkaitan dengan *skill* dan atau keterampilan seperti paskibra, sepak bola, pramuka, UKS, Rohis, pencinta alam, karate, KIR, dan lain-lain dapat dilaksanakan melalui kegiatan

ektrakurikuler yang pembinaannya di sekolah/madrasah dapat melalui wakil kepala sekolah/madrasah bagian kesiswaan atau guru pembina yang menguasai bidang tersebut dan ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah. Berbeda dengan pengembangan diri tersebut, pengembangan diri dalam garapan bimbingan konseling adalah berkaitan dengan pengembangan bakat, minat, kemampuan, kepribadian, serta tugas-tugas perkembangan yang berkaitan dengan peserta didik. Sehingga pelaksanaannya pun dilakukan dengan cara tersendiri, yang jika dalam rumusan bimbingan konseling komprehensif dilakukan melalui empat kategori strategi layanan, yakni melalui pelayanan dasar bimbingan konseling, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual dan dukungan sistem.

Pelayanan dasar, pelayanan responsif, dan perencanaan individual merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada konseli atau peserta didik secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan layanan-layanan langsung tersebut, hal ini seperti yang dikemukakan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 yaitu :

“Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya teknologi informasi dan komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli.”

Keberadaan komponen dukungan sistem ini sangat penting, sebab setiap program bimbingan dan konseling sudah tentu membutuhkan dukungan

sistem yang menunjuk pada aktivitas-aktivitas manajemen bimbingan yang dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektifitas program bimbingan dan konseling.

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Sekampung pada bulan Mei 2012, diperoleh beberapa data sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan konseling baik individual maupun kelompok, guru bimbingan dan konseling harus selalu mencari tempat alternatif misalnya di mushola, di perpustakaan, atau di ruangan yang sedang tidak digunakan. Ruang bimbingan dan konseling di sekolah ini belum dapat digunakan untuk melakukan kegiatan konseling, baik konseling individual maupun konseling kelompok. Ruang bimbingan dan konseling ini masih bercampur menjadi satu dengan ruangan lain, yaitu ruang kesiswaan, bahkan tanpa penyekat.
2. Kegiatan bimbingan dan konseling yang sifatnya klasikal hanya dapat dilaksanakan saat ada jam pelajaran yang kosong, misalnya saat guru bidang studi berhalangan hadir dan tidak masuk kelas.
3. Kerja sama yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas atau guru bidang studi adalah dalam penanganan siswa yang bermasalah khususnya dalam pelanggaran tata tertib sekolah. Siswa dengan kasus banyak alpa, membolos, berkelahi, melawan guru, berseragam tidak lengkap, membawa benda-benda yang dilarang untuk dibawa ke sekolah dan melanggar peraturan

sekolah yang lainnya, jika tertangkap oleh guru bidang studi maupun wali kelas maka akan segera dilaporkan kepada guru bimbingan dan konseling.

4. Tidak adanya alokasi dana untuk operasional kegiatan bimbingan dan konseling, seperti untuk melaksanakan kegiatan kunjungan rumah (*home visi*), untuk memperbanyak berbagai instrumen pengumpul data (seperti angket, sosiometri, alat ungkap masalah (AUM, dll), memperbanyak buku pribadi, maupun untuk mengikuti kegiatan yang diadakan secara rutin seperti MGBK).

Berdasarkan hasil wawancara singkat tersebut, maka dapat dipahami bahwa di SMPN 2 Sekampung belum ada dukungan sistem dalam salah satu aspek sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk bimbingan dan konseling, kebijakan mengenai alokasi dana untuk aktivitas pendukung seperti untuk kegiatan *home visit* juga belum ada, alokasi waktu secara terjadwal untuk layanan bimbingan klasikalpun juga belum disediakan, namun kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dan guru bidang studi sudah terjalin meskipun baru sebatas pada penanganan siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian untuk mendeskripsikan aspek-aspek dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam cakupan wilayah yang lebih luas, yakni pada sekolah/madrasah tingkat menengah yang berada di wilayah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dengan

demikian maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Dukungan Sistem Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah/Madrasah Tingkat Menengah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2012/2013”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan kegiatan konseling baik individual maupun kelompok, guru bimbingan dan konseling harus selalu mencari tempat alternatif misalnya di mushola, di perpustakaan, atau di ruangan yang sedang tidak dipakai.
- b. Kegiatan bimbingan dan konseling yang sifatnya klasikal hanya dapat dilaksanakan saat ada jam pelajaran yang kosong
- c. Kerja sama yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas atau guru bidang studi masih terbatas pada siswa yang bermasalah khususnya dalam pelanggaran tata tertib sekolah
- d. Tidak adanya alokasi dana untuk operasional kegiatan bimbingan dan konseling

3. Pembatasan Masalah

Selain untuk lebih memperjelas arah dalam penelitian ini, juga karena keterbatasan kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu, masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada dukungan sistem

dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah tingkat menengah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2012/2013.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi dan pembatasan masalah di atas, permasalahannya dapat dirumuskan “Apa saja aspek dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah tingkat menengah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2012/2013?”

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah tingkat menengah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2012/2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah keilmuan bimbingan dan konseling yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai aspek-aspek dukungan sistem dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah dasar dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan yang memuat mengenai teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen pendidikan yang juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, agar dapat berjalan dengan optimal sudah menjadi suatu keharusan bila penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah mendapatkan dukungan manajemen yang baik agar segala bentuk kegiatan yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan efektif dan akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan.

Program bimbingan dan konseling komprehensif mengandung empat komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Pelayanan dasar, pelayanan responsif, dan perencanaan individual merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada konseli atau peserta didik secara langsung, sedangkan dukungan sistem

merupakan aspek manajemen yang secara tidak langsung mendukung kelancaran ketiga layanan tersebut.

Disebutkan di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 bahwa dukungan sistem memiliki tiga aspek, yaitu :

1. Pengembangan Jejaring (*networking*)

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, (3) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (4) melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling.

2. Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.

3. Riset dan Pengembangan

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan jejaring atau *networking* dalam dukungan sistem diantaranya dilakukan melalui kolaborasi dengan personel sekolah/madrasah khususnya dengan dengan guru dan wali kelas, dengan orang tua siswa dan dengan ahli atau pihak-pihak luar sekolah/madrasah. Kolaborasi dengan wali kelas dan guru bidang studi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang siswa, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2006:76) bahwa guru bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya). Kolaborasi dengan orang tua siswa perlu dilakukan agar gar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah/madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah.

Di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 disebutkan kolaborasi dengan orang tua siswa ini salah satunya dapat dilakukan dengan meminta orang tua untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah/madrasah menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya. Selanjutnya, bimbingan dan konseling juga perlu menjalin kerja sama dengan ahli atau pihak-pihak di luar sekolah sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan, yang menurut Supriatna (2011:74) salah satunya dapat dilakukan dengan psikolog untuk pengadaan tes psikologi yang berguna untuk mengetahui tingkat intelegensi, minat dan bakat serta keperibadian peserta didik. Hasil tes psikologi ini merupakan modal awal untuk memahami peserta didik dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan diri peserta didik.

Untuk aspek manajemen, diperlukan pengembangan staf guru bimbingan dan konseling dalam hal pengembangan profesionalitasnya. Pada dasarnya penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah harus dilaksanakan oleh tenaga profesional yaitu seorang guru bimbingan dan konseling atau yang sekarang juga dikenal dengan istilah konselor, dengan kualifikasi akademik seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 berikut ini :

“Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.”

Pengembangan profesionalitas guru bimbingan dan konseling perlu diupayakan agar guru bimbingan dan konseling atau konselor secara terus menerus berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya terutama bagi guru bimbingan dan konseling yang belum berkualifikasi akademik konselor. Pengembangan profesionalitas ini menurut Supriatna (2011 : 74) dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu : (a) *in-service training*, (b) aktif dalam organisasi profesi, (c) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah; seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (d) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).”

Aspek manajemen selanjutnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang memadai. Jika kegiatan belajar mengajar membutuhkan ruang kelas, ruang laboratorium ataupun ruang praktek, maka bimbingan dan konseling juga memerlukan ruang khusus yang dapat menunjang kenyamanan kerja konselor/guru bimbingan dan konseling dan juga siswa sebagai peserta layanannya. Di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007, disebutkan bahwa pengadaan ruang bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah perlu mempertimbangkan letak atau lokasi, ukuran, jenis dan jumlah ruangan, sebagai berikut:

1. Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling mudah diakses (strategis) oleh konseli tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga.
2. Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang
3. Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Jenis ruangan yang diperlukan diantaranya meliputi:
 - a. ruang kerja
 - b. ruang administrasi/ data

- c. ruang konseling individual
- d. ruang bimbingan dan konseling kelompok
- e. ruang biblio terapi
- f. ruang relaksasi/ desensitisasi
- g. ruang tamu

Selain ruangan, fasilitas pendukung lainnya juga harus dilengkapi, seperti :

1. Dokumen program bimbingan dan konseling (buku program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan program harian)
2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi bimbingan dan konseling seperti:
 - a. Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat sekolah, tes/inventori kepribadian, tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar
 - b. Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP, format satuan pelayanan, format-format surat (panggilan, referal), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi.
 - c. Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam komputer.
 - d. Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan atau kursus-kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran konseli, leger bimbingan dan konseling, buku realisasi kegiatan bimbingan dan konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/ bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, CD pembelajaran, OHP, LCD, TV); filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi dan data konseli), dan papan informasi bimbingan dan konseling.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu kebijakan anggaran atau alokasi dana untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Disebutkan dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur

Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 komponen anggaran meliputi:

- a. Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program
- b. Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk *home visit*, pembelian buku pendukung/ sumber bacaan, mengikuti seminar/ *workshop* atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGBK, pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan konseling).
- c. Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling (seperti membenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk terapi pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok).

Meskipun kegiatan *home visit* bersifat insidental, anggaran dana untuk kegiatan ini harus disediakan oleh pihak sekolah/madrasah.

Sedangkan kebijakan mengenai waktu, terdapat satu waktu yang harus dialokasikan oleh pihak sekolah untuk bimbingan dan konseling yaitu waktu terjadwal untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara klasikal seperti yang disebutkan dalam naskah Model dan Contoh Pengembangan Diri SMP, SMA, dan SMK yang diterbitkan oleh pusat kurikulum badan penelitian dan pengembangan pendidikan nasional Depdiknas tahun 2007 bahwa “volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal.”

Dukungan sistem yang baik akan sangat mendukung penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan maksimal akan mengantarkan pada pencapaian tujuan bimbingan dan konseling yang diinginkan, yaitu tercapainya tugas-tugas perkembangan peserta didik.